

**LAPORAN STUDI KELAYAKAN
PT MD PICTURES Tbk**

RENCANA AKUISISI

30 APRIL 2024



Kusnanto & rekan

Independent Business Appraisers

License : 2.19.0162
Indonesia

No. : 00113/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2024

26 Agustus 2024

Kepada Yth.

PT MD PICTURES Tbk
MD Place Tower 1 Lt. 8
Jl. Setiabudi Selatan No. 7
Jakarta 12910

U.p. : Direksi

Hal : Studi Kelayakan atas Rencana Akuisisi

Dengan hormat,

PT MD Pictures Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") bersama dengan PT Permata Surya Gitatama (selanjutnya disebut "**PSG**"), PT Net Visi Media Tbk (selanjutnya disebut "**NETV**"), Newton Capital Ltd. (selanjutnya disebut "**NCL**"), PT Sinergi Lintas Media (selanjutnya disebut "**SLM**"), PT Indika Inti Holdiko (selanjutnya disebut "**IIH**"), dan PT Teladan Investama (selanjutnya disebut "**TI**") merencanakan untuk melakukan beberapa aksi korporasi dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 26 Agustus 2024, Perseroan dan NCL telah menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement Over Loan Asset* (selanjutnya disebut "**CSPA-OLA**"), dimana Perseroan merencanakan untuk membeli utang dan menerima pengalihan hak, kepemilikan, dan kepentingan NCL yang jumlahnya sebesar 75,00% dari Rp 882,60 miliar dengan nilai transaksi sebesar Rp 661,95 miliar (selanjutnya disebut "**Aset Utang**") dari NCL, pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rencana Pembelian Aset Utang**").
- Pada tanggal 26 Agustus 2024, Perseroan, PSG, dan TI telah menandatangani *Conditional Share Subscription Agreement* (selanjutnya disebut "**CSSA-PSGTI**"), dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan penawaran umum terbatas tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atas saham dalam portepel Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" (selanjutnya disebut "**POJK 14/2019**") kepada PSG dan TI, dimana Perseroan akan menerbitkan sebanyak 951.121.700 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per lembar saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan, (selanjutnya disebut "**Rencana PMTHMETD – Perseroan**").



- NETV merencanakan untuk melakukan penggabungan saham atas saham NETV sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang “Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK 15/2022**”), dengan penggabungan sebanyak 23.453.177.240 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per saham menjadi sebanyak 11.726.588.621 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham (selanjutnya disebut “**Rencana Penggabungan Saham**”).
- Pada tanggal 26 Agustus 2024, Perseroan dan NETV telah menandatangani *Conditional Share Subscription Agreement* (selanjutnya disebut “**CSSA-NETV**”), dimana NETV merencanakan untuk melakukan penawaran umum terbatas tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atas saham dalam portepel NETV sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019 kepada Perseroan, dimana NETV akan menerbitkan sebanyak 25.220.946.827 saham baru seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp 200 per lembar saham atau sebesar 60,98% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor NETV, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 50,00 per saham atau dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp 1.261,05 miliar (selanjutnya disebut “**Rencana PMTHMETD – NETV**”) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebanyak 13.238.946.827 saham NETV merupakan bagian dari hasil konversi atas Rencana Pembelian Aset Utang sebesar Rp 661,95 miliar (selanjutnya disebut “**Rencana Konversi Saham**”) setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham; dan
 - Sebanyak 11.982.000.000 saham NETV merupakan bagian yang akan dibayarkan melalui pembelian tunai sebesar Rp 599,10 miliar (selanjutnya disebut “**Rencana Penyertaan Saham**”) setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham.
- Pada tanggal 26 Agustus 2024, Perseroan, SLM, IIH, dan TI telah menandatangani *Conditional Share Sale and Purchase Agreement* (selanjutnya disebut “**CSSPA**”), dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan akuisisi saham NETV dari SLM, IIH, dan TI dengan total nilai transaksi sebesar Rp 394,45 miliar dengan rincian sebagai berikut:
 - Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian saham NETV dari SLM sebanyak 5.903.179.393 saham atau setara dengan 14,27% saham NETV dengan nilai transaksi sebesar Rp 295,16 miliar (selanjutnya disebut “**Rencana Pembelian Saham SLM**”) setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham;
 - Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian saham NETV dan IIH sebanyak 667.037.176 saham atau setara dengan 1,61% saham NETV dengan nilai transaksi sebesar Rp 33,35 miliar (selanjutnya disebut “**Rencana Pembelian Saham IIH**”) setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham; dan
 - Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian saham NETV dari TI sebanyak 1.318.723.770 saham atau setara dengan 3,19% saham NETV dengan nilai transaksi sebesar Rp 65,94 miliar (selanjutnya disebut “**Rencana Pembelian Saham TI**”) setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham.



Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Pembelian Aset Utang, Rencana PMTHMETD – Perseroan, Rencana Penggabungan Saham, Rencana PMTHMETD – NETV, Rencana Konversi Saham, Rencana Penyertaan Saham, Rencana Pembelian Saham SLM, Rencana Pembelian Saham IIH, dan Rencana Pembelian Saham TI merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Rencana Transaksi**”.

Rencana Pembelian Aset Utang, Rencana Konversi Saham, Rencana Penyertaan Saham, Rencana Pembelian Saham SLM, Rencana Pembelian Saham IIH, dan Rencana Pembelian Saham TI selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Rencana Akuisisi**”.

Sehubungan dengan Rencana Akuisisi tersebut, manajemen Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “**KJPP**”) Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “**KR**” atau “**kami**”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kelayakan dari Rencana Akuisisi sesuai dengan surat penawaran kami No. KR/240610-001 tanggal 10 Juni 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), menyampaikan kelayakan atas Rencana Akuisisi.

ALASAN DAN LATAR BELAKANG RENCANA AKUISISI

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perfilman yang kegiatan usahanya meliputi kegiatan pembuatan atau memproduksi film dan video, perdagangan dan peredaran film dan video, serta menjadi agen distribusi, leveransir dan pemasok film dan video dari perusahaan lain. Perseroan berdomisili di MD Place Tower 1 Lantai 8, Jalan Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta 12910, dengan nomor telepon: (021) 2985 5777 dan *website*: www.mdentertainment.com.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, saat ini, Perseroan melalui entitas anak dan entitas asosiasi memiliki kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang jasa persewaan gedung dan/atau properti, bidang jasa persewaan mesin dan peralatan film, bidang produksi, pemasaran, dan perdagangan film. Dengan adanya pertumbuhan pada kinerja sektor industri kreatif, manajemen Perseroan percaya bahwa sektor usaha ini akan mengalami peningkatan dan pertumbuhan terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang menghadirkan berbagai *platform digital* yang beragam yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap daya minat untuk menonton.

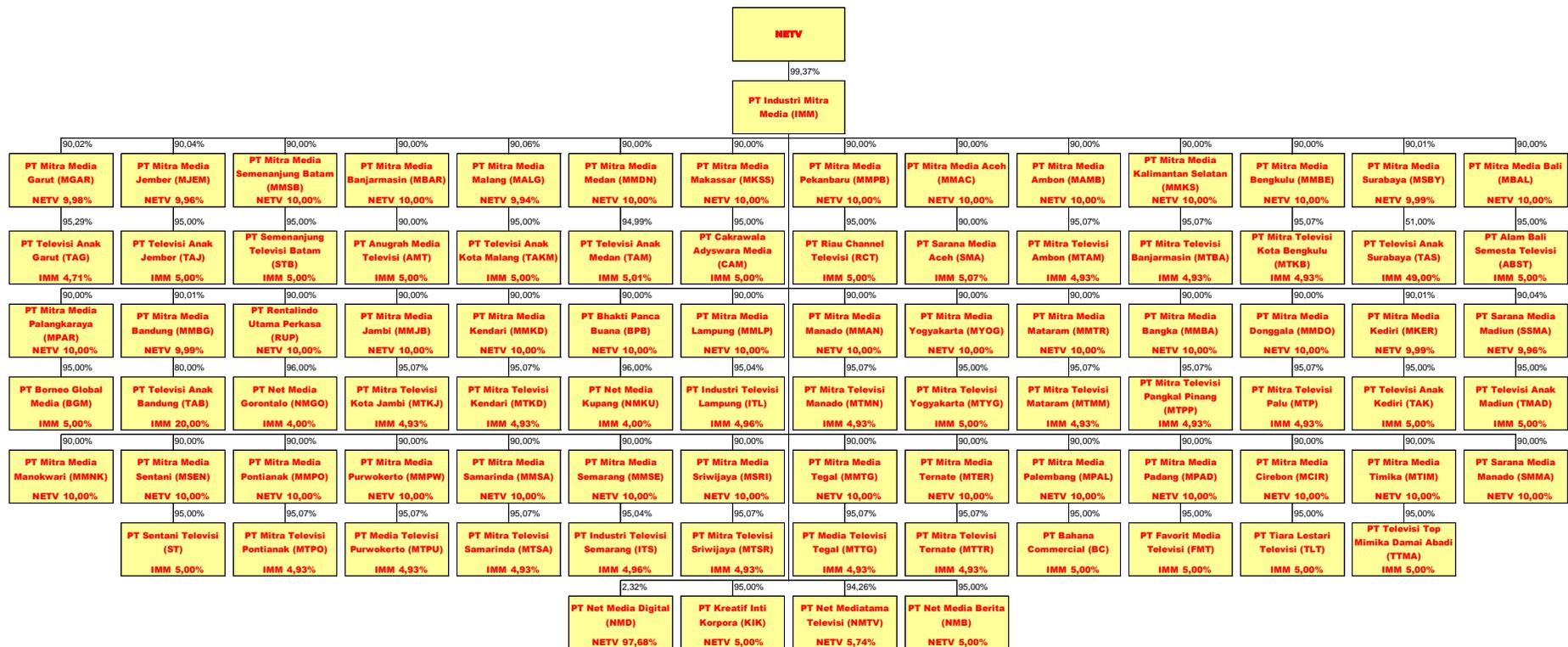


Seiring dengan prospek pertumbuhan kinerja sektor industri kreatif tersebut, saat ini Perseroan senantiasa untuk melakukan ekspansi bisnis di bidang industri kreatif agar dapat memanfaatkan momentum minat konsumsi masyarakat yang masih berlangsung tinggi dengan menerapkan strategi pertumbuhan usaha secara an-organik melalui akuisisi perusahaan sejenis, maupun perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan bagi strategi pengembangan usaha Perseroan.

Sebelumnya, berdasarkan *Loan Agreement* (selanjutnya disebut “**LA**”) pada tanggal 5 April 2024, NETV telah memperoleh fasilitas pinjaman dari NCL dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp 882,60 miliar yang akan jatuh tempo pada 6 Oktober 2024 (selanjutnya disebut “**Utang NETV**”). Selanjutnya, Perseroan merencanakan untuk melakukan restrukturisasi kondisi keuangan NETV dengan membeli utang dan menerima pengalihan Aset Utang yang jumlahnya sebesar 75,00% dari Utang NETV yang dimiliki oleh NCL terhadap NETV dengan nilai transaksi sebesar Rp 661,95 miliar sebagaimana telah disepakati dalam CSPA-OLA, dimana atas Utang NETV tersebut dapat dikonversi menjadi saham NETV berdasarkan LA yang telah disepakati oleh para pihak.



Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, pada tanggal 30 April 2024, struktur kepemilikan NETV adalah sebagai berikut:





IMM, MGAR, MJEM, MMSB, MBAR, MALG, MMDN, MKSS, MMPB, MMAC, MAMB, MMKS, MMBE, MSBY, MBAL, TAG, TAJ, STB, AMT, TAKM, TAM, CAM, RCT, SMA, MTAM, MTBA, MTKB, TAS, ABST, MPAR, MMBG, RUP, MMJB, MMKD, BPB, MMLP, MMAN, MYOG, MMTR, MMBA, MMDO, MKER, SSMA, BGM, TAB, NMGO, MTKJ, MTKD, NMKU, ITL, MTMN, MTYG, MTMM, MTPP, MTP, TAK, TMAD, MMNK, MSEN, MMPO, MMPW, MMSA, MMSE, MSRI, MMTG, MTER, MPAL, MPAD, MCIR, MTIM, SMMA, ST, MTPO, MTPU, MTS, ITS, MTSR, MTTG, MTTR, BC, FMT, TLT, TTMA, NMD, KIK, NMTV, dan NMB selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Entitas Anak dan Entitas Asosiasi NETV**”.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha dan status Entitas Anak dan Entitas Asosiasi NETV adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Status	Domisili	Operasional	Kegiatan Usaha
1	NETV	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya.
2	IMM	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
3	MGAR	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
4	MJEM	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
5	MMSB	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
6	MBAR	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
7	MALG	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
8	MMDN	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
9	MKSS	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
10	MMPB	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
11	MMAC	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
12	MAMB	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
13	MMKS	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
14	MMBE	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
15	MSBY	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
16	MBAL	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
17	TAG	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
18	TAJ	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
19	STB	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
20	AMT	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
21	TAKM	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
22	TAM	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
23	CAM	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
24	RCT	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
25	SMA	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
26	MTAM	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
27	MTBA	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
28	MTKB	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
29	TAS	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
30	ABST	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman



No.	Keterangan	Status	Domisili	Operasional	Kegiatan Usaha
31	MPAR	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
32	MMBG	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
33	RUP	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
34	MMJB	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
35	MMKD	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
36	BPB	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
37	MMLP	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
38	MMAN	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
39	MYOG	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
40	MMTR	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
41	MMBA	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
42	MMDO	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
43	MKER	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen, aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun.
44	SSMA	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Perusahaan holding
45	BGM	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
46	TAB	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
47	NMGO	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
48	MTKJ	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
49	MTKD	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
50	NMKU	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
51	ITL	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
52	MTMN	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
53	MTYG	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
54	MTMM	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
55	MTPP	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
56	MTP	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
57	TAK	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
58	TMAD	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
59	MMNK	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
60	MSEN	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
61	MMPO	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
62	MMPW	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
63	MMSA	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
64	MMSE	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
65	MSRI	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Investasi
66	MMTG	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
67	MTER	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
68	MPAL	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
69	MPAD	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
70	MCIR	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen
71	MTIM	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi, dana pensiun, aktivitas kantor pusat, dan konsultasi manajemen



No.	Keterangan	Status	Domisili	Operasional	Kegiatan Usaha
72	SMMA	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Investasi
73	ST	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
74	MTPO	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
75	MTPU	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
76	MTSA	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
77	ITS	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
78	M TSR	Tertutup	Indonesia	Tidak Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
79	MTTG	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
80	M TTR	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
81	BC	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
82	FMT	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
83	TLT	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
84	TTMA	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman
85	NMD	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Perdagangan umum, jasa konsultasi dan jasa portal web
86	KIK	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Jasa aktivitas pascaproduksi film, video dan program televisi, penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE), penyelenggara event khusus, impresariat seni dan festival seni, dan produksi film, video dan program televisi oleh swasta
87	NMTV	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta
88	NMB	Tertutup	Indonesia	Beroperasi	Aktivitas kantor berita oleh swasta, dan portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial

Dalam rangka Rencana Konversi Saham dan Rencana Penyertaan Saham, Perseroan merencanakan untuk mengambil bagian atas saham baru seri B yang akan diterbitkan oleh NETV dengan skema rencana transaksi sebagian dengan melakukan konversi saham dan dengan melakukan penyertaan saham melalui pembayaran tunai oleh Perseroan yang secara bersamaan dengan rencana NCL untuk mengambil sebagian sisa saham baru seri B yang akan diterbitkan oleh NETV dengan melakukan konversi atas sisa Utang NETV yang dimiliki oleh NCL terhadap NETV, yaitu sebesar Rp 220,65 miliar sehubungan dengan Rencana PMTHMETD – NETV setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham.

Selanjutnya, Perseroan juga merencanakan untuk melakukan pembelian saham NETV yang dimiliki oleh SLM, IIH, dan TI sebagai langkah bisnis untuk meningkatkan kepemilikan Perseroan terhadap NETV. Dengan melakukan Rencana Pembelian Saham SLM, Rencana Pembelian Saham IIH, dan Rencana Pembelian Saham TI, Perseroan akan bertindak selaku pemegang saham pengendali dengan kepemilikan mayoritas sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan dan efisiensi serta efektivitas bagi Perseroan dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan operasional bagi NETV pada masa yang akan datang.

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan optimis akan memperoleh kontribusi positif pada kinerja keuangan konsolidasian Perseroan di masa yang akan datang sehingga dapat memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu perusahaan dalam bisnis sektor industri kreatif di Indonesia. Dengan semakin kuatnya posisi Perseroan tersebut, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi dan akses pembiayaan dari para investor dan kreditur kepada Perseroan seiring dengan meningkatnya kredibilitas dan kinerja Perseroan serta hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Perseroan dan memberikan kinerja positif secara keseluruhan di masa yang akan datang.



Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berharap dapat menerapkan strategi pengembangan bisnis Perseroan yang dapat meningkatkan kapitalisasi pasar Perseroan dalam skala global dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh NETV serta mendukung pertumbuhan portofolio dan bisnis jangka panjang Perseroan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Alasan dilakukannya Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Rencana Transaksi merupakan salah satu upaya Perseroan dalam meningkatkan dan menerapkan pertumbuhan terutama dengan mengembangkan teknologi yang menghadirkan berbagai *platform digital* yang beragam yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap daya minat untuk menonton. Seiring dengan prospek pertumbuhan kinerja sektor industri kreatif tersebut, saat ini Perseroan senantiasa mengkaji peluang untuk melakukan ekspansi bisnis di bidang industri kreatif agar dapat memanfaatkan momentum minat konsumsi masyarakat yang masih berlangsung tinggi dengan menerapkan strategi pertumbuhan usaha secara an-organik melalui akuisisi perusahaan sejenis, maupun perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan bagi strategi pengembangan usaha Perseroan.
- Rencana Transaksi menjadi bagian dari rencana Perseroan untuk melakukan restrukturisasi kondisi keuangan NETV sebagai langkah bisnis Perseroan dengan berbagai skema rencana transaksi untuk memperoleh dan meningkatkan kepemilikan Perseroan terhadap NETV. Dengan melakukan Rencana Transaksi, Perseroan akan bertindak selaku pemegang saham pengendali dengan kepemilikan mayoritas sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan dan efisiensi serta efektivitas bagi Perseroan dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan operasional bagi NETV pada masa yang akan datang.
- Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan optimis akan memperoleh kontribusi positif pada kinerja keuangan konsolidasian Perseroan di masa yang akan datang sehingga dapat memperkuat posisi Perseroan sebagai salah satu perusahaan dalam bisnis sektor industri kreatif di Indonesia. Dengan semakin kuatnya posisi Perseroan tersebut, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi dan akses pembiayaan dari para investor dan kreditur kepada Perseroan seiring dengan meningkatnya kredibilitas dan kinerja Perseroan serta hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan Perseroan dan memberikan kinerja positif secara keseluruhan di masa yang akan datang.
- Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berharap dapat menerapkan strategi pengembangan bisnis Perseroan yang dapat meningkatkan kapitalisasi pasar Perseroan dalam skala global dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh NETV serta mendukung pertumbuhan portofolio dan bisnis jangka panjang Perseroan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.



Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Akuisisi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan”.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, Rencana Akuisisi tersebut merupakan transaksi penambahan kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha” (selanjutnya disebut “**POJK 17/2020**”).

Untuk penambahan kegiatan usaha, POJK 17/2020 mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas transaksi tersebut, yang disiapkan oleh penilai independen.

Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan Rencana Akuisisi tersebut, maka Perseroan menunjuk penilai independen, KR untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha (selanjutnya disebut “**Laporan Studi Kelayakan**”) atas Rencana Akuisisi.

Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Akuisisi dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Laporan Studi Kelayakan ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Akuisisi atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Akuisisi.

TUJUAN DAN MAKSUD PENUGASAN

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha NETV (selanjutnya disebut “**Objek Penilaian**”) sehubungan dengan Rencana Akuisisi di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Akuisisi.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Akuisisi yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

Studi Kelayakan ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut “**POJK 35/2020**”) serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330 (selanjutnya disebut “**SPI**”).



TANGGAL STUDI KELAYAKAN

Studi kelayakan atas Rencana Akuisisi dalam Laporan Studi Kelayakan diperhitungkan pada tanggal 30 April 2024. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penyusunan Studi Kelayakan dari Rencana Akuisisi serta dari data keuangan NETV yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasian NETV untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 yang menjadi dasar penyusunan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Akuisisi.

JENIS LAPORAN

Jenis laporan studi kelayakan atas Rencana Akuisisi ini merupakan laporan terinci.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL STUDI KELAYAKAN (*SUBSEQUENT EVENT*)

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manajemen Perseroan, dari tanggal studi kelayakan, yaitu tanggal 30 April 2024, sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Akuisisi, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal studi kelayakan (*subsequent event*) yang secara signifikan dapat mempengaruhi kesimpulan studi kelayakan, kecuali kejadian penting sebagai berikut:

- Berdasarkan dengan Akta No. 46 tanggal 19 Juni 2024 dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Akta No. 46**"), mengenai perubahan Susunan Direksi NETV. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0216670 tanggal 21 Juni 2024, susunan Direksi NETV berubah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Lie Halim
Komisaris	:	Rachmat Nugroho
Komisaris Independen	:	Clifford David Rees

Direksi

Direktur Utama	:	Deddy Hariyanto
Direktur	:	Azuan Syahril
Direktur	:	Fendy Nagasaputra
Direktur	:	Ferry
Direktur	:	Surya Hadiwinata



DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

Dalam melakukan penugasan ini, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
2. Laporan keuangan konsolidasian NETV untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 yang telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Prahono & Chandra (selanjutnya disebut “**TPC**”) sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00591/2.0851/AU.1/10/1208-2/1/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan hal lain;
3. Laporan keuangan konsolidasian NETV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP TPC sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00119/2.0851/AU.1/10/1208-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan hal lain;
4. Laporan keuangan konsolidasian NETV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (selanjutnya disebut “**KNMTR**”) sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00273/2.1051/AU.1/10/0561-1/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
5. Laporan keuangan konsolidasian NETV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP KNMTR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 00791/2.1051/AU.1/10/0555-2/1/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan hal lain;
6. Laporan keuangan konsolidasian NETV untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan konsolidasian NETV untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yang telah diaudit oleh KAP KNMTR sebagaimana tertuang dalam laporannya No. 01247/2.1051/AU.1/10/0555-2/1/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan hal lain;
7. Proyeksi laporan keuangan konsolidasian NETV untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 – 2034 yang disusun oleh manajemen NETV;
8. Anggaran dasar NETV yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 46 mengenai perubahan susunan Direksi NETV;
9. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Priyadarshi Anand dengan posisi sebagai Direktur, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Rencana Transaksi;



10. Tarif pajak yang diberlakukan atas NETV adalah berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku umum, yaitu sebesar 22,00% masing-masing untuk tahun 2024 – 2034;
11. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan;
12. Data dan informasi industri berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
13. Data dan informasi pasar berdasarkan media cetak maupun elektronik antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
14. Data dan informasi ekonomi berdasarkan media cetak maupun elektronik, antara lain *website* Aswath Damodaran, *website* Bank Indonesia, *website* Bursa Efek Indonesia, dan Bloomberg;
15. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha; dan
16. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut.

Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Perseroan. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan hanya merupakan studi kelayakan atas Rencana Akuisisi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang dilakukan Perseroan.



KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Akuisisi yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen NETV. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. Kami telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja NETV yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang kami lakukan terhadap target kinerja NETV dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen NETV terhadap proyeksi laporan keuangan NETV tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, kami mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan kami bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Akuisisi.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan NETV atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan NETV bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Akuisisi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan kami maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang kami peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.



Karena hasil dari studi kelayakan kami sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional NETV.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Akuisisi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas status hukum NETV berdasarkan anggaran dasar NETV.

TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI

Dalam menyusun laporan studi kelayakan atas Rencana Akuisisi, KR diberikan kesempatan untuk melakukan inspeksi guna mendukung proses penyusunan Laporan Studi Kelayakan.

INDEPENDENSI PENILAI

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Akuisisi, KR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh analisis yang dihasilkan dari proses studi kelayakan ini dan KR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran kami No. KR/240610-001 tanggal 10 Juni 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

METODE YANG DIGUNAKAN

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Akuisisi dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Akuisisi, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun 8 bulan masa proyeksi sebagai berikut:

NPV : Rp 1.333,05 miliar
IRR : 18,53%
Payback Period : 5 tahun 11 bulan
Discounted Payback Period : 7 tahun 2 bulan

Sehubungan dengan studi kelayakan ini, kami ingin menekankan bahwa analisis kelayakan yang dihitung dengan metode diskonto arus kas didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai tingkat pendapatan, beban, dan akun-akun laporan posisi keuangan yang dikembangkan pihak manajemen Perseroan dan NETV melalui analisis atas kinerja historis dan pernyataan manajemen Perseroan dan NETV mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan datang sebelum Rencana Akuisisi. Kami melakukan penelaahan atas asumsi-asumsi tersebut dan menurut pendapat kami, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan tetapi, kami tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap perubahan dari asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi hasil analisis studi kelayakan. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi tersebut akan terealisasi, kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil yang diproyeksikan akan tercapai.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan NETV serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Akuisisi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Akuisisi mungkin berbeda.



DISTRIBUSI LAPORAN STUDI KELAYAKAN

Laporan Studi Kelayakan ini ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Akuisisi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain atau untuk kepentingan lain. Laporan Studi Kelayakan ini tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Akuisisi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitannya dengan Rencana Akuisisi dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.

Laporan Studi Kelayakan ini juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Laporan Studi Kelayakan kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini. Laporan Studi Kelayakan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel perusahaan (*corporate seal*) dari KJPP Kusnanto & rekan.

Hormat kami,
KJPP KUSNANTO & REKAN



Willy D. Kusnanto
Pimpinan Rekan

Izin Penilai : B-1.09.00153
STTD : STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis
MAPPI : 06-S-01996